



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK
INDONESIA, MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI BUMN REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2024 – 2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 11 (Sebelas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 11 September 2024
Waktu : Pukul 10.52 s.d. 12.27 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I DPR RI,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PDIP)
Acara : Pembahasan mengenai :
1. Penyesuaian RKA KL Tahun Anggaran 2025
(Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran);
dan
2. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
21 dari 53 orang Anggota, dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (F- PDIP)**
5 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Rieke Diah Pitaloka
 3. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 4. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 5. Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-PG)**
4 dari 8 orang Anggota
 1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
 2. H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.

3. Doni Akbar, S.E., M.M.
4. Drs. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. ERINDRA)

3 dari 7 orang Anggota

1. Andre Rosiade
2. Khilmi
3. Ir. H. La Tinro La Tunrung

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)

2 dari 5 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

1 dari 6 orang Anggota

1. Tommy Kurniawan

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

0 dari 5 orang Anggota

-

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin Ak, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
2. Abdul Hakim Bafagih
3. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Menteri Koperasi & UKM Republik Indonesia (Drs. Teten Masduki) beserta jajarannya,

2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.) beserta jajarannya,
3. Menteri BUMN Republik Indonesia (Erick Thohir, B.A., M.B.A.) beserta jajarannya.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Segera kita mulai rapat kita pada pagi hari ini. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri BUMN Republik Indonesia, masa sidang I tahun sidang 2024-2025, Rabu 11 September 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan, dan
Kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Masduki,
Saya ucapkan selamat datang kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, dan
Selamat datang kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, beserta seluruh jajarannya,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Bapak-Ibu, dan Saudara sekalian yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani 10 anggota, izin 13, jumlah fraksi 5. Kuorum fraksi telah terpenuhi, maka perkenanlah kami membuka rapat kerja pada hari ini, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri BUMN, atas



kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat kerja hari ini untuk membahas mengenai,

1. Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran; dan
2. Lain-lain.

Untuk itu, kami ingin mendapatkan persetujuan sesuai jadwal yang telah kami tetapkan atau telah ditetapkan. Apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12.00? Jam 1? 12.30 ya, maksimal, 12.30.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu, dan hadirin yang kami muliakan,

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025, maka dapat kami sampaikan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga dari Badan Anggaran sebagai bahan penyempurnaan RKA-K/L mitra kerja Komisi VI Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp937.170.000.000,00.
2. Pagu Anggaran Tahun 2025 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp1.853.280.000.000,00.
3. Pagu Anggaran Tahun 2025 Kementerian BUMN Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp277.500.000.000,00.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut, hanya Kementerian Perdagangan yang mendapatkan tambahan anggaran, yakni sebesar Rp200.000.000.000,00. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap kepada masing-masing kementerian untuk dapat segera menyampaikan rencana kerja anggaran kementerian dengan rincian per program untuk selanjutnya bisa disampaikan ke Badan Anggaran Republik Indonesia sebagai bahan penetapan yang selambat-lambatnya tanggal 20, 12 September 2024.

Bapak-Ibu, dan Saudara sekalian,

Seperti, rapat hari ini merupakan suatu rapat rangkaian sejak Pagu Indikatif ke Pagu Indikatif, ke Pagu Definitif. Kita, Komisi VI, selalu mencermati bagaimana masa transisi pemerintahan tentunya selalu terkait dengan *interkoneksi* anggaran kementerian antara kementerian yang saat ini dengan kesinambungan program pemerintah atau kementerian yang selanjutnya. Dan semoga tiga menteri yang hadir di sini kita harapkan masih berlanjut untuk menjadi menteri di masa pemerintahan ke depan.



Dalam proses transisi pemerintahan, kesinambungan anggaran menjadi elemen krusial yang memastikan stabilitas pembangunan dan keberlanjutan program-program strategis. Anggaran negara adalah fondasi bagi pelaksanaan kebijakan publik dan oleh karena itu, kesinambungan antara anggaran yang telah disusun sebelumnya tentunya dengan visi serta program pemerintahan baru perlu di rancang secara matang dan itu pun sudah kita bahas di dalam rapat-rapat sebelumnya.

Kesinambungan anggaran mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintahan baru dengan program-program prioritasnya harus mampu merespons tantangan yang ada dan tetap menghargai dan melanjutkan program-program vital dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini penting agar tidak terjadi penurunan kinerja, terutama dalam sektor-sektor esensial, seperti kalau di dalam lingkup kita adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ini penting, karena kesinambungan anggaran juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap konsistensi kebijakan negara.

Dalam menjaga kesinambungan tersebut, pemerintah baru tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dan inovasi. Penyesuaian ini dilakukan agar lebih sesuai dengan visi-misi baru yang ingin dicapai tanpa harus mengorbankan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana anggaran.

Setiap pemerintahan memiliki agenda prioritas dan kebijakan legal yang baik untuk mampu, yang baik harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut tanpa mengabaikan pencapaian jangka panjang yang telah dikerjakan sebelumnya. Pada akhirnya, kesinambungan anggaran adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, memastikan sinergi antara program pemerintahan baru dan pengelolaan anggaran yang berkesinambungan. Negara dapat terus bergerak maju merespons perubahan yang tepat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada Menteri Koperasi/UMKM, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri BUMN Republik Indonesia, untuk menyampaikan tanggapan terhadap Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Republik Indonesia.

Waktu dan tempat kami persilakan. Yang pertama, kami memberikan kesempatan kepada Menteri Koperasi.

Kami silakan, Pak Teten Masduki.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Baik, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Komisi VI DPR RI, juga
Rekan sejawat *nih*, Pak Mendag,
Pak Erick bersama jajaran,**

Yang dua ini lanjut, Pak. Kalau ini saya, pidato terakhir, Pak.

Bapak-Ibu sekalian,

Langsung saja saya ingin menyampaikan, bahwa penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian tahun 2025 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran. Nah, seperti tadi Pak Ketua sampaikan, anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2025 sebesar 937,16 miliar. Ini kurang sebenarnya, Pak, tapi ya sudah. Dan ini akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp388,23 miliar, dan untuk kewirausahaan 548,92 miliar.

Kami atas nama jajaran Kementerian Koperasi dan UKM, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI DPR RI atas dukungannya dan kerja samanya selama 5 tahun terakhir. Kemitraan yang sangat erat ini kami rasakan sangat membantu kami dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia yang cukup besar.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila selama kerja sama ini terdapat kekurangan, baik dalam perencanaan maupun juga dalam pelaksanaan. Kami berharap hal-hal tersebut tidak mengurangi semangat kebersamaan kita dalam terus membangun dan memajukan koperasi dan UKM di masa yang akan datang.

Ke depan kami sangat berharap Komisi VI DPR RI terus memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Koperasi dan UKM, terutama dalam mendorong inovasi yang berkelanjutan untuk pengembangan koperasi dan UKM yang lebih tangguh, lebih kompetitif, di era persaingan bebas saat ini. Kami juga mohon dukungan dalam memperkuat kelembagaan, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM dapat ditingkatkan dari kementerian kelompok tiga menjadi kementerian kelompok dua, sejalan dengan peran strategis dan urgensinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya, kami persilakan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan.



MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Pak Ketua, dan
Seluruh Anggota DPR RI Komisi VI yang terhormat,
Pak Teten,
Pak Erick yang saya hormati, dan
Seluruh jajaran,**

Sebagaimana, Pak Ketua, kita sudah sepakati kemarin, anggaran kami Rp1.653.277.516.000,00 sudah disetujui. Dan juga disetujui oleh Komisi VI, kami mengajukan tambahan Rp500 miliar,

1. Untuk penguatan perwakilan perdagangan pemasaran produk Indonesia di luar negeri;
2. Promosi peningkatan ekspor;
3. Integrasi informasi ekspor; dan
4. Penguatan kebijakan peningkatan ekspor.

Nah, ini sebagian besar untuk meningkatkan, apa namanya, kemampuan ekspor kita. Jadi, sangat diperlukan apalagi sekarang, Pak Ketua, dulu ada kemudian ITPC itu anggarannya dari Kemenlu, sekarang *enggak* lagi, diserahkan kepada kita. Sudah diserahkan kepada kita, anggaran kita *enggak* ada, jadi itu bisa pulang, *gitu*. Oleh karena itu, memang, apa, ini pilihan yang berat kalau sampai kita *enggak* dapat, *gitu*. Karena pilihannya, kita akan pilih cara lain, sebagian besar ITPC akan pulang ke tanah air.

Saya kira demikian, mohon bantuannya. Mudah-mudahan yang kita ajukan 500 itu bisa kita dapatkan.

Terima kasih, selamat pagi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri BUMN, Bapak Erick Tohir.

MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,



*Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Tentu, terima kasih Pimpinan, dan
Tentu para sahabat Komisi VI yang hadir hari ini, dan
Tentu Para Menteri, Pak Teten,
Pak Zul,**

Saya terus-terang, berkali-kali selalu menyampaikan, tidak mungkin kelancaran pemerintahan ini bisa tercapai tanpa kontribusi dari Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, kita selalu bersama-sama bersama Komisi VI, tidak hanya menjadi mitra kerja yang solid, tetapi juga menjadi mitra dalam menjaga prinsip *check and balance* sebagai, tentu tupoksi kita masing-masing.

Karena itu, kembali kami dari Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih atas *support*-nya. Dan tentu seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dengan upaya-upaya yang kita telah lakukan bersama, ya, memang anggarannya ternyata tetap, tetapi target *deviden* naik menjadi 90 T. Jadi, ya mumpung ini bagian dari cobaan buat kami di BUMN, *gitu* ya. Dan mudah-mudahan kembali tidak *mengendorkan* kinerja kami dan saya tidak tahu ini saat yang tepat, mungkin kalau kemarin di rapat terakhir, *kayaknya* ini rapat yang tidak ada lagi, ternyata ada lagi.

Mungkin saya siapkan pantun sebagai penutup. Jarang-jarang saya kasih pantun, baru tadi malam *nulisnya*, ini.

*Masuk Senayan mengucap salam
Sebelum pergi kita berbaris rapi
Terima kasih untuk Komisi VI
Atas sinergi yang bermanfaat bagi negeri*

Boleh dua, ya? boleh dua? Boleh ya, *enggak tiga kok, enggak*. Dua.

*Ke Pulau Seribu mendayung sampan
Sampai di sana membakar ikan
Jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan
Izinkan mohon maaf kami sampaikan*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Kami persilakan kawan-kawan, apakah perlu pendalaman atau merespons pantun?

Teman-teman,



Apa yang disampaikan oleh kementerian, dari apa yang sudah diputuskan Badan Anggaran yang perlu kita sepakati bersama, tetap terkait bagaimana anggaran itu memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lewat keputusan politik di Komisi VI dengan mitra kerja kita.

Untuk itu, masih ada yang mendaftar untuk pendalaman. Yang pertama, Pak Amin dari PKS.

Kami silakan, Pak.

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Terima kasih.

**Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Bapak-bapak Menteri,
Pak Menkop UKM,
Pak Mendag,
Pak Men-BUMN, dan
Wakil, dan
Semua jajaran,**

Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya *enggak* bisa sebutkan satu persatu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kalau tadi Pak Erick bilang anggarannya tetap atau bahkan ada yang berkurang sebagai ujian, semoga dengan ujian itu semakin kuat, Pak, *gitu*. *Kalo* orang-orang beriman *tuh* diuji kan semakin kuat, Pak, imannya, Pak. Ya, memang ini Komisi VI konon, ya, ini mitra-mitra kita ini anggarannya paling kecil, bahkan kadang-kadang *diledak* sama mitra komisi-komisi yang lain ini.

Baik, saya singkat saja, Pak. Ada dua poin yang *pengen* saya sampaikan dan khusus buat Pak Erick, ya, karena Pak Zul sama Pak Teten baru pekan kemarin kita bertemu dan saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan yang saya sampaikan ke Pak Erick ini pun sebetulnya sudah pernah di-*state* Pak Erick sendiri, sudah membuat pernyataan di publik, terkait dengan *merger* AP1, AP2, ya. Yang intinya, bahwa dari dampak dari, atau proses *merger* itu tidak akan berdampak pada, ya PHK, pengurangan karyawan. Dan ini yang memang, ya biasa ada kegelisahan, karena apa yang ingin dicapai dari *merger* itu kan selain peningkatan kapasitas bisnis, kualitas layanan, ya, tentu efisiensi, efektivitas.

Nah, mendengar kata efisiensi *kan*, nanti ujung-ujungnya kan orang berpikir ada perampangan, ada pengurangan, *gitu loh*. Jadi, walaupun Pak Erick sudah menyampaikan di publik, ini banyak pihak yang berharap untuk

menyuarakan, memastikan, bahwa dari proses merger itu tidak akan ada pengurangan karyawan.

Tentu saja, kita berharap memang Kementerian BUMN, dan saya yakinlah, sudah membuat *business planning* yang matang. Yang bukan saja merger, tapi juga pasca merger, apa saja bisnis-bisnis yang akan dikerjakan, baik yang aeronautika maupun non-aeronautika? Itu, ya.

Dan tentu kita berharap dari penguatan bisnis yang ada nanti tidak akan ada monopoli juga, itu sisi lain. Tetap BUMN menjalankan perannya sebagai pembina, pemberdaya UMKM-UMKM, khususnya UMKM lokal. Itu, Pak, yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Di antara hal yang sangat menjadi perhatian publik, Pak, di Kementerian BUMN dan tentu di kami sebagai Komisi VI adalah ini Menteri BUMN melalui BUMN-BUMN, setiap tahun ini PMN-PMN terus, *gitu kan*. Publik itu tidak paham betul, bahwa sebagian besar dari PMN ini adalah untuk penugasan, untuk PSO, *gitu*.

Nah, *cuman* memang yang selama ini juga agak mengganjal di kami, dari PSO-PSO atau BUMN-BUMN yang diberikan kepada BUMN dengan judul PSO itu, itu kadang-kadang tidak sebanding dengan kebutuhan biaya yang dibutuhkan oleh BUMN itu sendiri. Ada *ketersendatan*, ada kelambatan, ada jumlah yang tidak sama, yang tentu sangat berdampak bagi keuangan BUMN itu sendiri.

Jadi, kita tidak bisa menutup mata, bahwa ya memang salah satu fungsi atau tugas BUMN adalah sebagai *agent of development*. Tapi, tentu kita juga ke depan tidak ingin, ya, penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN itu berdampak bagi nasib BUMN itu sendiri dan itu tidak sedikit.

Nah, *cuman* kami di Komisi VI selama ini *kan* tidak mendapatkan laporan yang rinci. Dampak dari penugasan untuk membangun infrastruktur BUMN Karya. Ya, mestinya modalnya sekian, kemudian dikasih PMN sekian, *gitu kan*. Kemudian, dampak penugasan untuk misalnya membangun listrik, jaringan listrik untuk BBM misalnya, subsidi BBM. Ini seberapa besar dampak dari, apa namanya, penugasan-penugasan itu?

Oleh karena itu, Pimpinan Komisi VI, memang menurut saya, kita penting, Pak, membentuk semacam Panja Penugasan BUMN, sehingga kita bisa membuat kajian, menilai secara detail apa dampak dari penugasan-penugasan itu dan apa sebaiknya, bagaimana seharusnya pola penugasan dan pemberian PMN itu dijalankan sebaik-baiknya, sehingga tidak menjadikan nasib BUMN itu, ya menjadi lebih buruk. Karena juga selain menjalankan penugasan pemerintah, BUMN juga diberi target untuk mencapai profit yang setinggi-tingginya.

Ya, kalau itu disetujui, kita misalnya membuat Panja, nanti Panjanya dibikin *carry over* sampai periode yang akan datang.

Saya kira itu, Pak Pimpinan dan Pak Menteri semua, hadirin sekalian yang dirahmati Allah.

Saya akhiri dengan pantun, menyambut pantunnya Pak Erick.

*Dari Irian, burung Cendrawasih
Cukup sekian, terima kasih*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Memang selalu di Komisi VI ini memutuskan politik anggaran antara *cost* yang kita keluarkan dan terukur dengan *benefit* yang langsung menyentuh ke persoalan masyarakat atau kesejahteraan. Nah, memang selain anggaran, ada dua sayap yang tadi disinggung oleh Pak Amin, adalah sayap belanja BUMN.

Maka, dengan anggaran *cost* yang kita keluarkan dan belanja BUMN, di situlah sebenarnya ukuran-ukuran PDB kita itu sejauh mana investasi, konsumsi, peningkatan ekspor, pengurangan impor, dan yang lain-lainnya, itu bisa terukur. Dan itu menjadi suatu hal-hal yang narasi-narasi teknokratik di dalam konsepsi kita bicara anggaran.

Selanjutnya, kami persilakan, Mbak Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, S.H., M.Sc.):

Terima kasih.

**Bapak Pimpinan,
Bapak Menteri dan jajaran,
Bapak Menteri-Menteri dan jajaran yang saya hormati,**

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, saya rasa saya *enggak* bisa, *enggak* akan *ngomong* banyak ya, Pak, ya, karena itu sudah *given*, kita juga *udah* *enggak* bisa apa-apa lagi. Namun, saya sebagai Anggota Komisi VI, sangat prihatin, Pak, bahwa anggaran mitra-mitra kerja kita ini *udah* kecil, diperkecil dengan pemotongan yang ada.

Termasuk Kementerian Investasi kemarin waktu kita ketemu, pemotongannya juga sangat-sangat luar biasa. Padahal menteri-menteri di depan kita ini, mitra kerja kita termasuk Investasi, adalah menteri-menteri penggerak perekonomian kita. *Kan* aneh ya? Menteri-menteri penggerak perekonomian, tapi dibekali dengan anggaran yang menurut saya, dengan target yang Pak Erick katakan, target investasi ke depan, ya memprihatinkan ya. Dan, apa namanya, tidak, saya yakin tidak akan mencukupi, *gitu*. Kalau

enggak pinter-pinter gimana caranya supaya program-program ke depan itu, target-target itu bisa tercapai.

Saya hanya ingin mengambil kesempatan ini, Pak Bimo, bahwa tentunya pemerintahan Pak Jokowi satu bulan lagi ini, Pak. Satu bulan lagi akan berakhir, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Akan hadir presiden terpilih kita, Pak Prabowo dan Wakil Presiden, Pak Gibran Rakabuming Raka. Saya *enggak* tahu, apakah menteri-menteri ini, saya yakin banyak yang akan duduk kembali, *tapi* apakah akan tetap menjadi mitra komisi VI atau tidak? Nah, ini yang kita *enggak* tahu.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Pak Menteri, ya *kan*. Selama kita bermitra 5 tahun tadi saya sampaikan, eh, Pak Erick sampaikan, saya merasakan kemitraan itu benar-benar terjalin antara menteri-menteri, apa namanya, mitra-mitra kerja kita Komisi VI.

Dan pada kesempatan yang baik ini juga, saya mohon maaf, apa ada kata-kata yang tajam, kata-kata yang tidak berkenan ya, Pak, ya. Tentunya tujuannya *cuman* satu, Pak, untuk kepentingan nasional masyarakat, bangsa, dan negara kita.

Saya ini kelihatannya keras, Pak, padahal karena saya bukan orang Jawa, ya, Dapilnya Jawa. Tetapi kalau *ngomong*, *ngomong* biasa dibilang marah, *ngomong* biasa dibilang marah, padahal, nah, ini pasti dibilang juga marah.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE, S.E.):

Bilang *dong* asli mana, *gitu*. Asli mana, *gitu*.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, S.H., M.Sc.):

Padahal *enggak* marah.

Saya ucapkan terima kasih, Pak. Saya hanya ada poin-poin penting yang ingin saya ingatkan kepada Pak Menteri.

Pak Teten,

Undang-Undang Koperasi. Bagaimana ke depan ini Kementerian Pak Teten ini bisa menjadi, apa namanya, apa, mendukung yang namanya perkembangan daripada koperasi kita. Undang-Undang Koperasi kita belum jadi, ini menjadi PR dari Kementerian UMKM. PR Bapak juga satu lagi, bagaimana UMKM kita ini naik kelas, Pak? Ya *kan*. Nah, ini banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk UMKM ini.

Kalau untuk Pak Menteri Perdagangan, ya, tentunya tadi yang disampaikan, bagaimana kita melakukan penguatan pangsa ekspor kita, Pak. Untuk ekspor utama kita maupun ke depan, tujuan pasar-pasar non-tradisional kita. Dan bagaimana Kementerian Perdagangan ke depan mampu,

Pak, untuk mencari solusi daripada persoalan-persoalan distribusi nasional kita, Pak. Karena kita tahu, berapa tahun terakhir ini, ya, kebutuhan pokok saja *lah*, kita mempunyai masalah di dalam hal tersebut. Kemudian, juga pengawasan terhadap barang impor, Pak Zul. Bagaimana ke depan itu kita mengedepankan kepentingan daripada produk-produk nasional kita.

Untuk Pak Erick. Bagaimana saya ingin ke depan melihat Pak Erick, banyak yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN. Bagaimana BUMN kita ini *go global*, Pak. Saya ingin melihat BUMN kita ini seperti BUMN Singapura, Pak, ya. Benar-benar mereka mempunyai peranan besar di dalam global, kancah globalnya tersebut, Bapak.

Kemudian, tentunya membantu, Pak, Kementerian Perdagangan juga, *sinergisitas* di dalam peningkatan ekspor, ekspansi ke pasar-pasar internasional. Dan saya berharap, dalam ke depan ini, Pak, tentunya diselesaikan *nih*. Saya sudah melihat Pak Erick di akhir penghujung sudah mulai *nih* menyelesaikan masalah-masalah daripada yang ada, korupsi, masalah utang-piutang, dan lain-lain dengan, apa, Jiwasraya yang Bapak ini kan, lakukan. Dan kita harap, ke depan PR BUMN ini sangat besar, ke depan. Dan tentunya, tadi diharapkan, bahwa BUMN ini memang menjadi tiang daripada perekonomian Indonesia ke depan.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Program-program prioritas dan program-program vital yang tetap harus dijalankan untuk pemerintahan ke depan. Dan kesinambungan ini tercermin dalam hal yang menyangkut anggaran.

Selanjutnya, kami persilakan ke Pak Andre Rosiade.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE, S.E.):

Siap.

Terima kasih.

**Mas Bimo,
Seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri, Kang Teten,
Bang Zul,
Pak Erik, dan
Seluruh jajaran,**

Yang pertama-tama, tentu ini mungkin rapat kita terakhir ya. Komisi VI dengan Bapak-Bapak Menteri bertiga, sebagai jabatannya masing-masing. Kang Teten saya *enggak* tahu mau ke mana. Bang Zul, saya juga *enggak*



tahu apakah tetap di sini atau jadi Menko nanti, *gitu loh*. Pak Erick juga, apakah jadi Menteri BUMN atau jadi Menko, kita juga *enggak* tahu. *Kan* tergantung semuanya, presiden terpilih akan memutuskan.

Tapi sebagai Anggota Komisi VI Fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Sumatera Barat, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke bapak-bapak bertiga. Kang Teten, bagaimana sebagai Menteri Koperasi, begitu gerak cepat untuk membantu laporan kami terhadap penipuan masyarakat di Dharmasraya. Saya ucapkan banyak terima kasih, Kang, atas apresiasi dan kecepatannya.

Yang kedua, untuk Bang Zul sebagai Menteri Perdagangan, yang kita *enggak* tahu mau jadi Menko atau jadi Menteri Perdagangan lagi, ya. Yang jelas, saya ucapkan banyak terima kasih, ya. *Alhamdulillah*, saya, Bang, mau melaporkan, berkat bantuan Kementerian Perdagangan kepada kami di Sumatera Barat, yang pertama, rekomendasi teknis yang diusulkan oleh Kementerian Perdagangan itu sudah terwujud, di mana Pasar Fase 7 melalui anggaran Kementerian PUPR sudah hampir selesai, ya, mungkin 97%, dengan nilai 103 miliar. Itu kolaborasi saya, Bang Zul, dengan Walikota Padang, Hendri Septa, kadernya Bang Zul. *Alhamdulillah*, itu sudah kita wujudkan. Mudah-mudahan di hujung jabatan Pak Jokowi, bisa diresmikan di Kota Padang.

Lalu, juga saya mendapatkan bantuan ada lima pasar lain di Pesisir Selatan, di Dharmasraya, di Sijunjung, dan di Kota Padang juga ada dua, di Pasar Belimbing dan Ulak Karang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perdagangan yang telah membantu Sumatera Barat, daerah pemilihan kami, bisa terus ekonominya bergerak.

Mudah-mudahan, setelah ini, apakah Bang Zul tetap Mendag atau kadernya Bang Zul jadi Mendag, kita lanjutkan rekomendasi teknis di Padang. Pasar Fase 1 sampai Fase 6, Bang Zul.

Yang kedua, untuk Pak Menteri BUMN. Eh, ketiga *dong*, di tadi pertama Kang Teten, kedua Bang Zul, ketiga, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang luar biasa ya, yang bisa membawa kebangkitan sepak bola Indonesia. Ini luar biasa, ya, *alhamdulillah*. Ya, harapan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 masih bisa terjaga. *Insyah Allah*, amin.

Saya mengucapkan terima kasih, Pak Erick, bahwa mimpi besar saya, yaitu pembangunan *fly over* Sitinjau Laut, yang mungkin banyak orang bilang itu tidak mungkin, tapi *Insyah Allah* KPBU, Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha di mana di Utama Karya sebagai pemrakarsa, itu bisa berjalan. *Insyah Allah* dalam beberapa hari ke depan, mungkin dua hari lagi, akan diumumkan oleh Kementerian PUPR sebagai pemenang.

Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, yang sudah memberikan dukungan kepada salah satu BUMN karya, Utama Karya, untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Dan tadi malam waktu *nonton*

bola, saya bertemu dengan Dirjen Bina Marga, diinformasikan *Insy Allah* dalam berapa hari ini akan diumumkan oleh Kementerian PUPR.

Jadi, saya ucapkan terima kasih, Pak Menteri. Ini proyek dua tahapan, yang awal ini mungkin hampir mendekati 2 triliun, yang kedua nanti tahap kedua, 2 triliun, jadi totalnya 4 triliun. Ini akan membantu masyarakat Sumatera Barat, *wabil* khusus jalur logistik antara Kabupaten Solok menuju Kota Padang.

Jadi *gitu*, Bang Zul. Jadi, kalau Bang Zul OTW dari Solok ke Kota Padang, itu *fly over* Sitinjau Laut yang diprakarsai oleh Andre Rosiade itu membantu masyarakat Sumatra Barat, Bang. Jadi, saya ucapkan terima kasih ke Pak Erick Thohir ya, karena ini konkret.

Dan terakhir, juga soal kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, M. Jamil, Rumah Sakit M. Jamil, sudah disetujui. Terima kasih, Pak Menteri. Dan supaya Bang Zul tahu, yang di sebelah Bang Zul nanti siang saya ketemu lagi, Bang. Beliau akan memfasilitasi Rektor UNAND untuk melakukan kerja sama dengan BUMN-BUMN yang ada.

Jadi, sekali lagi terima kasih. Saya doakan Bapak-Bapak bertiga bisa melanjutkan dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Khilmi, ya.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Ketua Komisi VI, beserta Anggota,
Yang saya hormati Kementerian Koperasi, Pak Teten,
Kementerian Perdagangan, Pak Zul,
Kementerian BUMN, Pak Erick,
Pak Wamen, Pak Tiko beserta jajarannya,**

Jadi, saya menindaklanjuti apa yang diutarakan Bu Evita tadi, memang kementerian yang di Komisi VI ini kan menyangkut pertumbuhan ekonomi, Pak, tetapi di sini *nih* anggarannya itu terlalu kecil. Kata Pak Zul, "Berangkatnya bisa, pulangnya enggak bisa." Kalau itu *kan* sama dengan bohong, *enggak* bisa pulang kan jadi *enggak* bisa membawa apa-apa, *kan*,



Pak. Pulang itu yang harusnya kan membawa oleh-oleh, dan Kementerian Koperasi juga begitu.

Jadi, sebetulnya sinergi antara Kementerian Perdagangan dan Koperasi ini ke depannya harus dieratkan, Pak, karena apa? Di Kementerian Perdagangan ini *kan* ada dulu sembilan bahan pokok yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Tetapi selama kita 10 tahun di Komisi VI ini *kan*, harga *kan* kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang turun. Itu seharusnya *kan* tidak boleh, karena apa? Karena pemain-pemain dari barang yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan ini kadang-kadang masih dikuasai oleh salah satu kelompok *aja*.

Jadi, yang sering naik turun itu *kan* beras, gula, minyak goreng. Ini, kemarin, minyak goreng yang harusnya harganya 14.000 atau 16.000, sekarang sudah di angka 17. Nah, ini *kan* padahal, apa, pengawasan di Kementerian Perdagangan *kan* sudah ada dan itu alokasi yang diberikan dari pemerintah untuk minyak kita ini *kan* harusnya harga itu tidak boleh naik turun.

Jadi, saya berharap ke depan, ketiga kementerian ini anggarannya jangan sampai dipotong, setidaknya itu tetap *kayak* dulu *lah*, karena manfaat dari program-program dari mitra kita ini sangat bagus buat kita, buat masyarakat, sehingga hampir 80% Anggota Komisi VI ini terpilih lagi, Pak. Jadi, itu *kan* berkat program-program dari mitra kita untuk kita salurkan ke masyarakat.

Terus, di Kementerian BUMN ini, Pak Erick, ya. Setelah saya melihat, pendirian *subholding* ini *kan* kemarin bertujuan untuk efisiensi. Saya tanya, Pak Erick, padahal *holding* yang dibentuk dari BUMN ini *kan* kebanyakan berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi, ada *holding* di BUMN ini, itu pasti berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Misalnya InJourney, Pertamina, pupuk, perkebunan, dan PLN. Jadi, tujuan untuk membentuk *subholding* ini *kan* tujuannya bukan di IPO. Bagaimana efisiensi ini bisa terbentuk, sehingga anggaran APBN untuk *mensubsidi* rakyat ini jangan besar-besar, *gitu loh*.

Ini sebagai contoh. Misalnya, ini InJourney punya beberapa anak perusahaan. Misalnya nanti tujuannya yang AP-AP untuk di IPO, nanti *kan* bahaya, ini *kan* berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Peli, apa, Pelabuhan udara ini. Kedua, Pelindo, itu *kan* juga untuk kepentingan masyarakat banyak dan ini *kan* menyangkut anggaran APBN yang akan disubsidikan kepada masyarakat.

Pertamina. Pertamina juga begitu, kita ada *subholding* kira-kira tujuh. Padahal yang dikerjakan, Pak, itu satu jenis, yang akan diberikan kepada masyarakat. Di situ Pertamina ada *subholding* di PIS, Patra Niaga, PGN, Kilang, PHE, terus ada, apa itu? Yang energi terbarukan itu.

Jadi, ini, Pak, kalau nanti kita *nih*, misalnya Kilang, PIS, Patra Niaga, PHE. Empat perusahaan ini *kan* harusnya satu jenis yang dikerjakan, *tapi* ini

ada empat perusahaan yang tumbuh. Ini akan timbul 11, eh, empat jenis pajak yang timbul. TIA, misalnya PIS *ngangkut* ke PHE, ada 11% PPN timbul, pajak penghasilan. Jadi, ini kalau empat ini timbul, berarti kan ada 44% tambah nilai, walaupun itu bisa dikonsolidasi.

Terus, pajak penghasilan. Di salah satu perusahaan dapat untung, akan timbul 23% pajak penghasilan. Di sini nanti timbul lagi 23%, 23%. Ini kan namanya tidak efisien, masalahnya yang dikerjakan satu dan ini mengandung unsur penugasan dari negara.

Kalau ini timbul, ya, harganya di sini tidak akan bisa murah. Karena saya kemarin kunjungan antar parlemen ke Thailand, Pak, banyak belajar, menanyakan mana perusahaan yang perlu di, apa, *subholding*, mana yang tidak.

Dan kalau di Thailand, Pak, walaupun itu pakai *e-toll*, ya, yang di Tol itu. Itu masih menggunakan tenaga manusia, di situ masih ditunggu. Kalau di Indonesia kan *enggak*, timbul aplikasi baru tidak menciptakan lapangan kerja baru. Nah, ini kan kasihan, padahal sumber daya manusia kita ini paling besar.

Sampai di Thailand, Pak, anak SD sampai SMP itu belajar bahasa Jawa. Saya tanya, "Kenapa *kok* belajar bahasa Jawa?" Karena pangsa pasar di Indonesia itu paling besar di Jawa. Dan di situ, Pak, di SD itu sudah tumbuh berdiri 10 bendera negara ASEAN.

Saya tanya lagi, "Kenapa ini negara bendera ASEAN, 10 bendera negara ASEAN ini dikibarkan di situ?" Karena kita ini sekarang satu hamparan, tidak ada batasan. Kita mau kerja di Thailand, bebas, mau di Indonesia, bebas, dan pajak semua bebas.

Dan inilah peran serta Kementerian Koperasi, Perdagangan, dan Kementerian BUMN, bagaimana kita bisa menumbuhkan, tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Itu tambahan dari saya, Pak Erick. Mudah-mudahan ke depan, siapa tahu Pak Erick ini masih dipercaya oleh pemerintah ke depan di tempat yang sama, inilah koreksi-koreksi kita selama 10 tahun ini.

Sekian.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalikumsalam.

Selanjutnya, ke sebelah kanan lagi. Mbak Rieke.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA, S.S., M.Hum.)

Bismillahirrahmanirrahim,



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Di *on* dulu, belum di-*on*.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA, S.S., M.Hum.):

Udah, udah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Udah.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA, S.S., M.Hum.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

**Yang kami hormati Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Koperasi dan UMKM beserta jajarannya,
Menteri Perdagangan beserta jajarannya,
Menteri BUMN beserta jajarannya,**

Ini adalah barangkali menjadi rapat kerja terakhir kita di Komisi VI. Pertama, tentu saya ucapkan banyak terima kasih atas berbagai kerja sama dan dinamika dalam mengatasi dan memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang sesuai dengan bidang kerja kita.

Untuk Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan, saya tidak akan banyak bicara, untuk anggaran saya setuju, bahkan kalau bisa ditambah, karena ini langsung bersentuhan dengan persoalan publik, seperti teman-teman sampaikan tadi.

Saya izinkan supaya tidak terlalu panjang, karena ini juga cukup panjang. Saya ingin menyampaikan satu hal yang saya kira sangat penting bagi kita semua, khususnya kepada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi *legacy* di masa akhir jabatan kita bersama, DPR sampai 30 September dan pemerintah sampai 20 Oktober, ganti pemerintahan baru.

Menurut saya, bisa, asal kita kompak memperjuangkannya, yaitu terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena pada akhirnya semua yang disampaikan selama bertahun-tahun, kemudian akan dituangkan di dalam satu sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana di dalamnya

harapan saya tentu saja, ini jangan hanya dipandang dalam perspektif administrasi pemerintahan pusat dan daerah belaka.

Di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah sistem tata kelola pemerintahan. Di dalam sistem tata kelola pemerintahan, bicara tentang data dari hulu ke hilir, berbagai bidang kehidupan rakyat, berbagai bidang pembangunan, dan kita juga harus meyakini. Artinya di balik data dalam angka negara yang ditampilkan di dalam SPBE, di balik data dalam angka negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan, yang menjadi amanat kita semua sebagai orang-orang yang, *Insyah Allah*, bukan hanya terpilih tetapi juga terpanggil untuk memberikan pengabdian. *Amin ya Rabbal Alamin*.

Nah, Bapak-Ibu yang kami hormati,

Pembukaan itu mudah-mudahan, mohon maaf, sama sekali tidak untuk menggurui, karena ini menjadi penting bagi perjalanan pemerintah baru ke depan dan perjalanan bangsa ini ke depan. Tidak mungkin lagi kita tidak menggunakan sistem digital.

Pada tanggal 27 Mei 2024, Presiden secara resmi meluncurkan GovTech Indonesia bernama Ina Digital. Pada saat itu, Pak Menteri BUMN menyampaikan alasan pemilihan Perum Peruri, yang ditugaskan adalah Perum Peruri. Berdasarkan pada portofolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan digital pemerintahan yang sebelumnya menjadi produk unggulan Perum Peruri.

Pasal 3 ayat (1) dan Menteri, tentu saja, bukan hanya karena asumsi pribadi. Penugasan ini adalah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital yang Menugaskan Perum Peruri Menyelenggarakan aplikasi SPBE Prioritas, meliputi:

1. Perencanaan penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas;
2. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE prioritas;
3. Pengintegrasian aplikasi;
4. Pengoperasian;
5. Keamanan. Keamanan artinya keamanan sistem dan datanya;
6. Distribusi atau diseminasi;
7. Pemeliharaan aplikasi;
8. Pengelolaan infrastruktur SPBE.

Pasal 7 Perpres 82/2023, "Sumber pendanaan dari APBN dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pada perkembangannya, saya memantau, sebetulnya ingin menyampaikan ini sejak lama, Pimpinan, tetapi karena kita banyak persoalan yang harus segera diselesaikan.

Di kesempatan berharga ini, saya ingin mempertanyakan, pemantauan dan analisis yang saya lakukan secara berkala, pada perkembangannya,



Perum Peruri selanjutnya menugaskan anak perusahaan, yaitu PT Peruri Digital Security. Betul, ya, Bapak? Betul. PDS, menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan otoritas, Saudara-Saudara, 9 aplikasi, Pimpinan, yang dipegang saat ini oleh PT PDS, anak perusahaan. Di dalam catatannya, saya mungkin, koreksi kalau data saya salah. Tetapi, apa yang dilansir oleh beberapa menteri, pertama, yaitu:

1. Layanan pendidikan terintegrasi,
2. Layanan kesehatan terintegrasi,
3. Layanan sosial terintegrasi,
4. Layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital,
5. Layanan transaksi keuangan negara. Transaksi keuangan negara sebagai layanan pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan seluruh penyedia layanan jasa keuangan, luar biasa. Nanti mohon dikoreksi jika apa yang saya sampaikan salah.
6. Layanan administrasi pemerintah di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian,
7. Layanan portal pelayanan publik, layanan *single sign-on* nasional, layanan identitas digital terpadu, layanan infrastruktur jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah dan komputasi awan,
8. Layanan Satu Data Indonesia,
9. Layanan kepolisian yang terintegrasi, meliputi penerbitan Surat Izin Mengemudi dan Izin Keramaian.

Subhanallah, otoritasnya besar sekali.

Namun demikian,

Saudara-saudara yang kami muliakan,

Saya, izinkan saya menyampaikan, kasus PT PDS, 26 November 2023. Polda Metro Jaya membongkar kasus korupsi pengadaan fiktif PT PDS, diduga tidak realisasikan program yang telah dianggarkan, antara lain

- *Data storage,*
- *Network performance monitoring and diagnostic,*
- *SIM, dan*
- *Managed service.*

19 Februari 2024, PT PDS menghadapi kegagalan sistem *e-materai*. Ini sudah dilansir di berbagai media, yang tidak dapat diakses selama 3 hari penuh. Kasus *e-materai* yang ramai saat ini adalah pada program pendaftaran CPNS 4 September 2024 yang memerlukan *e-materai*, laman PDS tidak dapat diakses.

5 September pada pukul 08.00, total pendaftar itu 2.922.336 orang. Pendaftar yang telah menyelesaikan *submit*, 1.011.148 orang. Jika dikalikan

dengan harga *e-materai* Rp20.000, telah masuk uang peserta ke PT PDS senilai 20.000.222.960.

Namun kemudian, ini *Head of Corporate Secretary* Peruri menyampaikan alasan *error* akibat tingginya akses. Selesaikan dengan meminta maaf? Tentu sebenarnya tidak selesai.

Lalu kemudian, bisa mengajukan pembatalan maksimal 3 hari. Pembelian hanya dilakukan untuk satu *invoice*, yang dikembalikan uang hanya 75%. Jangan dihitung 20.000-nya, kali sejuta, 75% *dibalikin*, sisanya ke mana, Pak Menteri? Permintaan pembatalan akan diproses maksimal 45 hari. Rp20.000,00 orang harus *nunggu* 45 hari, dan kemudian disampaikan melalui *helpdesk* pada laman resmi BKN. *Repot banget*.

Nah, pertanyaan saya, Pak Menteri. Ini bukan kesalahan, Pak Menteri, ini *clear* untuk publik. Ini bukan kesalahan Menteri BUMN, bukan kesalahan BKN, tetapi saya ingin menanyakan, boleh tertulis saja, Pak, karena ini akan menjadi *performance* kita semua, lembaga negara, karena kalau akan dilanjutkan di PT PDS, pengelolaan SPBE.

1. Tolong diberitahukan kepada kami, apa saja bukti keberhasilan program digital Perum Peruri dan PT PDS? Apa *key performance index* yang digunakan?
2. Bagaimana perkembangan kasus korupsi pengadaan fiktif Perum Peruri yang dibongkar Polda Metro Jaya 26 November?
3. Ini penting. Ini anggaran bagi tiga kementerian ini termasuk anggaran yang sangat minimalis, ya. Tapi saya ingin tahu, berapa anggaran dari APBN yang telah dialokasikan ke Perum Peruri? Dan dari mana saja sumber anggaran lainnya yang dialokasikan untuk *GovTech Ina Digital*?
4. Sejauh mana penyelenggaraan *GovTech Ina Digital*, khususnya sembilan aplikasi oleh Perum Peruri yang diserahkan pada anak perusahaan PT PDS?

Saya merekomendasikan, Pak Menteri, *yuk kita perjuangin bareng-bareng*, Pak, mumpung ada sekian hari. Saya mendesak jajaran Perum Peruri dan PT PDS diberi sanksi, Pak, dievaluasi. *Eenggak* cukup kasus itu, minta maaf.

Ya, yang kedua adalah saya mendesak BPK lakukan audit menyeluruh terhadap Perum Peruri atas alokasi APBN dan sumber anggaran lainnya dengan alasan untuk penyelenggaraan *GovTech Ina Digital*.

Ketiga, mohon dukungannya dengan dasar kinerja yang dipertontonkan oleh Perum Peruri dan PT PDS. Ini dari awal saya sampaikan, ini akan menjadi salah satu tonggak bagaimana administrasi dan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dan daerah dan Satu Data, dan seterusnya. Karena itu, saya mendesak untuk merevisi Perpres 82/2023, mengkaji ulang penyelenggaraan SPBE diserahkan pada Perum Peruri yang menugaskan PT PDS dalam implementasinya. Saya mendukung institusi penegak hukum

untuk melanjutkan penyelidikan dan membongkar dugaan kasus di Perum Peruri dan anak perusahaan.

Terakhir, saya ingin mengingatkan dengan segala kerendahan hati saya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, *profit* tidak boleh *profit taking*, tidak boleh orientasinya mengambil keuntungan. Begitu, ya, Pak? Sepakat, ya? Kalau Perumnya oke, penugasan, tetapi ketika begitu diserahkan kepada anak perusahaan berbentuk PT, maka menjadi *profit taking*, mau tidak mau. Ini disebutnya, kalau saya menganggapnya *social cost*.

Nah, Bapak Menteri yang saya hormati,

Mohon dukungannya. Sekali lagi, ini bukan kesalahan Menteri BUMN atau Kementerian BUMN, tetapi ini adalah upaya kita bersama untuk pemerintahan yang baru, evaluasi ulang. Kenapa tidak kementerian terkait yang memegang SPBE ini? *Entah* Kemkominfo atau kemudian untuk pemerintah daerah dengan Kemendagrinya, begitu. Kenapa harus PT, anak perusahaan?

Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan, tapi berkenan tidak berkenan, ini penting.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA, S.S., M.Hum.):

Apalagi kalau sampai *megang* sistem keuangan negara, Pimpinan.

Terakhir, izinkan saya untuk tidak membacakan pantun. Saya doakan semuanya, saya ingin menyampaikan doa di penghujung Raker terakhir kita ini,

Rabbi najjini minal qaumidz dzhalimin

Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim

Rabbi najjini minal qaumill hasidin,

Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang hasad

Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah *Subhanahu wa Ta ala*, Tuhan Yang Maha Esa.

Hasbunallah wanikmal wakil, nikmal maula wanikman nasir,

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,



MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Sekarang kebalik-balik, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tiga bulan sekali umrah.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, *monggo*.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Sekarang kebalik-balik, Pak. PDI pakai doa. PAN joget-joget, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya. Ini Mufti Anam belum datang, Pak. Itu kalau lomba doa, PDI Perjuangan menang, Pak. PKS bisa tergeser.

Selanjutnya bisa pakai doa juga, silakan Ibu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Gak usah, Pak. iya langsung doa penutup, ya.

Terima kasih.

**Pimpinan, dan
Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,
Pak Menteri,
Pak Mendag, dan
Pak Menkop, serta
Pak Menteri BUMN,**

Dinamika perekonomian, pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah menjadikan mitra kerja selama 5 tahun. Luar biasa, dengan adanya pandemi COVID yang selama 3 tahun membuat ekonomi kita begitu seperti benang kusut. Jadi, kita betul-betul mengurai bagaimana perekonomian kita menjadi lebih stabil dan *Alhamdulillah*, dengan kerja sama antara menteri dengan ke parlemen, sehingga kita bisa melewatinya sedikit demi sedikit.

Tapi, kita juga tidak, masih ada PR yang untuk ke depan pemerintahan baru juga harus dikerjakan. Kita lihat bagaimana dinamika perekonomian global membuat harga komoditas sangat fluktuasi dan terus juga pelambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang ekonomi, apa, mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok dan Uni Eropa, menyebabkan penurunan permintaan ekspor dan tentu mengurangi kinerja ekspor Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan agrikultur.

Kementerian Koperasi, Kemendag, dan BUMN, walaupun mungkin tidak secara langsung, juga harus mengantisipasi masalah ini, terutama Kemendag. Di tengah-tengah masyarakat, PHK sudah banyak terjadi, daya beli masyarakat langsung anjlok, usaha dan perdagangan lesu, dan baru-baru ini kita ada isu yang mengatakan, bahwa akan ada penurunan kelompok ekonomi menengah yang jatuh miskin begitu besar. Mereka akan hidup, nanti ke depan, pendapatan itu membayar utang, Pak Menteri.

Nah, ini jadi tantangan buat kita semua, mitra-mitra kerja yang di bidang perekonomian, agar meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan perekonomian di negara kita. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi 5 tahun yang lalu ini kita harus evaluasi, Pak Menteri, dan diserahkan kepada menteri yang nanti pengganti, siapa pun, atau menteri yang tetap akan ada nanti sebelum ini.

Yang pertama, mungkin untuk Kemendag, Pak. Untuk Kemendag ini *kan* fluktuasi harga terus-menerus terjadi, terus-menerus, ya. Dan bahkan membentuk Satgas, ya. Dan ini, Pak, ini kita jangan terlalu banyak membentuk Satgas. Kita hanya fokus *aja* kepada Satgas tertentu, seperti misalkan yang sering kita dengar laporannya tekstil, lalu terus juga produk kecantikan, elektronik, keramik. Kemarin, kita dapat RDPU dengan mereka, yang mereka hancur-lebur berantakan dengan adanya impor keramik, apa, ilegal dari negara Tiongkok yang murah harganya.

Nah, jadi itu mungkin jadi PR buat Kemendag. Jadi, walaupun anggaran kita kecil, baik Pak Menteri Mendag, Menkop, dan Menteri BUMN, ini jadi tantangan. *Mending* kita punya prinsip ekonomi bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya, *tapi* kita *output* dan *outcome*-nya juga besar, *gitu*. Nah, ini jadi tantangan, Pak Menteri, ke depan. Itu yang masalah tentang Satgas.

Lalu yang kedua, tentang masalah untuk ekspor, ya. Ekspor ini penting sekali buat Pak Menteri. *Alhamdulillah*, ditambah tadi 200 miliar. Mudah-mudahan walaupun 200 miliar, Pak Menteri, minta 500 miliar, bisa meningkatkan ekspor.

Nah, ini perlu dipahami, Pak. Bagaimana, Pak, yang sudah, dampak ratifikasi Undang-Undang Perdagangan yang sudah berapa kali kita sahkan di DPR? Apakah ini dapat membantu Kemendag untuk membangun mitra dagang dan mengantisipasi pelambatan ekonomi global? Nah, ini kita perlu laporannya.

Lalu, Pak Menteri Koperasi. Menteri Koperasi kita untuk, khusus ya untuk yang koperasi-koperasi bodong di Indonesia ini jadi PR besar, Pak, ya. Kita lihat datanya, 2021 hingga 2022 ada 12 koperasi simpan pinjam bodong dengan jumlah pemutaran dana fantastisnya 500 triliun dan di tahun 2023, 8 kasus yang merugikan sampai 26 triliun. Nah, ini juga PR, Pak, untuk Menteri Koperasi ke depan.

Dan dengan anggaran yang tadi Bapak selalu sampaikan, bagaimana penyelesaian, ya, untuk menghadapi masalah koperasi yang begitu carut-marut, yang membohongi masyarakat. Dan tentu, Pak, ini kita harus jelas, bagaimana penyelesaian dengan anggota-anggota koperasi yang tertipu dengan nilainya hingga mencapai triliun rupiah?

Nah, terus, Pak Menteri Koperasi, UMKM juga, kami ingin datanya. Ada beberapa koperasi UMKM baru *startup* dan *eksis* tidak sampai 2-3 tahun dan apa yang perlu dilanjutkan oleh menteri yang baru pada kabinet mendatang?

Pak Menteri BUMN, memang *dividen* kita 90 triliun, Pak, ya. Ini sebenarnya harapan negara sebetulnya lebih besar lagi, Pak, ya, walaupun Bapak tidak ditambah anggarannya, tapi bagi negara ini *fresh money*, Pak. Ya, untuk dividen, apa namanya, dari BUMN. Kita harapkan ke depan kinerja BUMN seperti yang diharapkan oleh negara, tentu lebih besar daripada 90 triliun.

Terima kasih, Pak Menteri.

Itu saja, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terakhir, kami persilakan, Pak Darmadi.

Profesor Darmadi.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pakai doa juga?

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Boleh doa lagi, cara, cara konghucu atau apa?

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):

Iya.



Yang terhormat Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, saya sebut dari yang senior dulu, Sebelah saya ada Pak Hakim, Pak, anak muda PAN yang luar biasa, Kemudian, Pak Teten Masduki, Menteri Koperasi, teman saya sudah lama ini ya, kemudian, Pak Erick Thohir, sohib yang selalu menolong, terima kasih, dan jajarannya,

Yang pertama, saya mulai dari Pak Teten. Ini saya *enggak* panjang, *enggak* masuk ke teknis, tapi memang saya lihat *problem* yang Bapak sampaikan di presentasi ini cukup, sangat bagus, ya. Tetapi memang untuk mendukung menyelesaikan masalah-masalah yang di sini, yang saya lihat 10 tahun terakhir ini, dukungan pemerintah itu tidak maksimal, Pak. Kenapa? Apa yang bisa Bapak kerjakan dengan anggaran yang terus turun? Ini persoalan.

Jadi Bapak bekerja keras, tapi kalau anggarannya juga *enggak* dimaksimalkan, padahal kita *ngomong* koperasi dan UMKM, itu jadi *nonsense*, Pak, ya. Jadi *bullshit lah* ini.

Dulu zaman Pak SBY, itu Menteri Koperasi itu hampir 2 triliun, Pak, anggarannya. Terus turun, komitmennya *enggak* ada, 2T, sekarang 900, ya. Sepuluh tahun ini, ya, begitu terus, *gitu*. masih ingat *kan*, Pak Zul? waktu menterinya, teman-teman kita itu, ya, tinggi sekali.

Nah, ini menjadi, saya pikir saya minta Pak Andre dan Pak Khilmi untuk sampaikan ke Pak Prabowo. Kalau *ngomong* Koperasi dan UMKM, kalau anggaran seperti kayak *gini*, ya, memang berat juga, sulit juga, ya. Komitmen itu nanti dari Presiden yang akan datang kita *butuhkan*, begitu.

Jadi, lihat indeks kewirausahaan, *ranking* berapa kita, Pak? 70 lebih, Pak, 74. Kita ini di ASEAN juga bukan yang paling bagus, sama Singapura, ya, jauhlah. Indeks kewirausahaan, sama Singapura itu sudah 8 *komaan*, iya, 8,6. Thailand di atas kita, Malaysia di atas kita. Kita hanya di atas, mungkin Filipina dan Myan, Burma. Yang lain kita kalah. Jadi, *ngomong* indeks kewirausahaan sudah sulit, kita, ya. *Ngomong* daya saing, apalagi, 77% UMKM di Indonesia itu *enggak* punya daya saing, Pak.

Jadi, apa yang harus kita lakukan ke depan? Tentu kita butuh komitmen Presiden yang akan datang. Nah, ini peran Pak Andre ini penting sekali untuk disampaikan, karena Pak Andre ini orang dekat presiden, ya, dan Pak Kilmi juga. Jadi, mohon disampaikan, itu koperasi.

Yang kedua, Pak Menteri, Pak Zul. Ini senior ya. Pak Zul ini awalnya banyak disangsikan orang di Mendag, Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE, S.E.):

Pak Zul ini orang dekatnya Pak Prabowo, Pak.

F-PDIP (Prof (Ascc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):

Iya, betul. Kalau Pak, Pak Zul ini minta, saya dengar ini, minta apa *aja*, dikasih sama Pak Prabowo, ya. Jadi betul.

Jadi, dulu awal Mendag, *tuh* banyak menyangsikan, *kan* kursi panas ini, banyak yang berhenti, *nih*, di sini, diturunkan *nih*, tetapi ternyata Pak Zul membuktikan, bahwa Pak Zulkifli ini pembelajar yang cepat. Usia boleh kalah, saya ingat umurnya 62, Pak, betul *kan*? Lahirnya bulan Mei.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Makanya *enggak* nyalon lagi, Pak, *udah* tua, Pak.

F-PDIP (Prof (Ascc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):

Jadi kita harapkan tentu masih bisa terus menjadi Menteri Perdagangan, ya.

Nah, ada hal-hal penting memang yang lagi kunci, yang mungkin harus diselesaikan yang akan datang. Yang penting, yang paling penting ini adalah masalah impor-impor ilegal ini, Pak, ya. Ini *kan* belum terselesaikan dengan baik, ya.

Yang kedua, juga masalah ini mungkin kaitannya banyak, tapi sekarang, Pak, dunia usaha ini menjerit, Pak. Sepi sekali, daya beli turun, *ngeluh* semua ya, *ngeluh* semua, apalagi Jawa, Pak, ampun turun. Deflasi kita ini, Pak.

Nah, ini juga disampaikan ke Pak Presiden yang akan datang, yang katanya teman baik Bapak, teman sangat baik, *gitu*. Jadi, ini kita minta ini bisa diselesaikan. Belum lagi dikejar-kejar pajak, Pak, sekarang Pak, semua hampir semua dikejar-kejar pajak, Pak, *ngeluh*, Pak, ya. Tiba-tiba hitungannya keluar, sekian dendanya, SKP-nya sekian, *kan* gawat, Pak, ini ya. Makanya, saya minta kepada Pak Menteri BUMN, ya, tolong yang dikejar dividennya BUMN *aja* untuk penerimaan. Jangan 90T *dong*, 100T misalnya, ya *kan*. Dan saya yakin Pak Erick bisa *nyelesaikan* itu, 100T itu, *kan* tangan ajaibnya, Pak Erick ini, ya.

Nah, saya minta, jadi jangan pedagang, pengusaha-pengusaha itu dikejar-kejar, ya, dicari kelemahan-kelemahannya. Nah, ini masalah perdagangan dalam negeri, Pak Zul, ya. *Udah* masalah impor ilegal, masalah kemudian dikejar-kejar, dan sebagainya, ini menjadi masalah yang besar.

Jadi, tugas pemerintah yang akan datang tidak ringan, berat, di samping pasar global, ya, menjadi sangat berat. Menjadi menteri yang akan datang itu, saya pikir, jauh lebih berat daripada sekarang, begitu, ya. Nah, ini menjadi poin penting.

Jadi, kita minta, saya tadi *dibisikin* “Pak Darmadi, jangan panjang-panjang sama Pak Zul, Pak”, *gitu* sama Pak Hakim, Pak Zul. Ini *ngawal* saya terus di sini. Jadi, ya tolong *nih* saya titip, Pak, Pak Hakim ini, Pak Menteri.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Bukan titipan itu.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A):

Anak muda yang bagus, Pak, *gitu*.

Yang ketiga adalah Pak Erick, Pak Menteri BUMN. Pak, mungkin tugas ke depan, saya yakin sekali bahwa Bapak masih Menteri BUMN, ya. Bapak kerja samanya sangat baik, tepuk tangan *enggak* apa-apa.

Tapi saya minta, bahwa beberapa poin nanti ke depan yang paling harus diselesaikan, pertama RUU BUMN, Pak. Ini *mandek*, Pak, ya. Saya *enggak* tahu muaranya di mana, ujungnya di mana, *enggak* selesai-selesai. *Udah* tiga periode, Pak, *enggak* selesai itu Undang-Undang BUMN.

Ke depan menjadi tugas Bapak untuk menggolkan ini, Pak. Jadi, kalau Bapak terpilih lagi Menteri BUMN, ini paling penting, RUU BUMN. Kalau *enggak*, Bapak *enggak* bisa gerak juga. Bapak *enggak* bisa terlalu maksimal juga, begitu. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, masalah efisiensi dan efektivitas BUMN, Pak. Ini tolong dimaksimalkan lagi, dan saya yakin 90 menuju ke 100 itu sudah dekat, Pak, hanya 10 triliun, Pak. Jadi tidak susah, saya pikir, untuk dapat dividen 100T, betul *enggak*, Pak Tiko? Pak Arya, *kan* betul *kan*? Jadi, 100 triliun itu.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pak Arya suruh jawab dulu *dong*. Pak Arya, Pak Arya suruh jawab dulu *dong*.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A):

Pak Arya nanti menjaga 100 triliun itu masuk, Pak.

Jadi, yang ketiga adalah saya pikir saya punya masalah titipan dari dapil, Pak, ya. Yang mungkin Bapak kemarin saya sudah sampaikan, mohon kalau bisa apa sudah dibantu atau belum? Ya, ditelepon, soal kereta api, Pak. Masih angkat dapil, sudah ditelepon, ya? Jadi, tolong minta bantu diselesaikan dengan koperasi di sana.

Yang kedua adalah masalah gas, Pak, PGN, Pak. Kami belum sempat panggil, tapi masalah gas ini, yang kuotanya turun terus, Pak Zul, ya, Pak Zul, Menteri, Pak Menteri. Kuota industri ini, kuotanya dulu 70%, sekarang 60%, sekarang 50%, Pak, yang HGBT itu. Ini juga menyulitkan. Jadi, saya titip itu,

supaya nanti bisa diproses oleh PGN, ya. Kuotanya jangan 50%, Pak, diturunkan terus, begitu. Jadi, untuk yang subsidi itu, Pak.

Yang ketiga adalah, memang saya berharap Pak Erick ke depan, penunjukan komisaris dan direksi, Pak. Mohon pertimbangan lain boleh, bukan *enggak* boleh. Tetapi kompetensi itu jadi penting sekali, Pak, ya. Karena apalagi mau *ngejar* dividen yang cukup besar ini. Kalau nahkodanya ini *enggak* bagus, ya tentu ini berat juga.

Nah, kalau banyak titipan ke nahkodanya, ini berat nanti jalannya, Pak, *enggak* sampai-sampai. Jadi, faktor yang lain boleh, bukan *enggak* boleh, politik, yang lain-lain boleh *aja*, tetapi kompetensi menjadi prioritas utama. Itu titipan dari kami ya, sehingga nanti penunjukan apalagi yang namanya Dirut, Pak, itu nahkoda, kalau *enggak* baik-baik *nunjuknya*, ini dividen juga nanti bisa turun terus, ya. Nah, ini kita harapkan ke depan, nanti poin ini bisa diadopsi, begitu.

Nah saya pikir dari saya cukup, Pak, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, saya harus mengakhiri 12.30 sesuai keputusan awal rapat tadi.

Pak Harris Turino mendaftar, singkat saja, Pak, ya.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Nggih, matur suwun, Ketua.

**Yang terhormat Pimpinan, dan
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Trio Menteri;
Pak Menteri Koperasi,
Menteri Perdagangan, dan
Menteri BUMN,**

Sebelumnya, terima kasih atas kerja samanya selama 3 tahun saya ada di Komisi VI ini. Satu kerja sama yang luar biasa, di antara mitra di kementerian dengan kami di Komisi VI.

Ada beberapa masukan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kepada Menteri Koperasi, Pak. Kita tahu, Pak, PR yang belum selesai dari Pak Menkop adalah tentang korban koperasi simpan pinjam, Pak.

Jadi, menjelang akhir dari masa jabatan Pak Teten, mohon untuk bisa dibantu, paling tidak didorong, Pak, penyelesaiannya itu agar benar-benar keputusan pengadilan dalam kasus homologasi itu bisa dijalankan. Karena kasihan sekali, Pak, terlalu banyak korban yang menderita karena ini.

Dan nanti, pada saat nota serah terima dengan menteri baru, kalau memang diserahkan atau Bapak pegang lagi, ya, setidaknya ini disampaikan kepada menteri baru kalau belum tuntas, Pak Teten. Supaya ada perhatian prioritas dari menteri yang baru, agar tidak terlalu menderita.

Untuk Kementerian Perdagangan. Ini, untuk Kementerian Perdagangan, kita tahu surplusnya 49 bulan berturut-turut, tapi sekarang surplusnya sudah semakin mengecil, Pak. Dengan melambatnya atau turunnya harga *komoditi* menjadi satu ancaman, sehingga perlu dicari *source of new growth* bagi mendukung surplus perdagangan.

Dan hati-hati juga *purchasing manager index* untuk manufaktur, sekarang sudah masuk ke zona konstruk, kontraksi, sudah di bawah 50, angka tepatnya di bulan Juli adalah di 49,3, sehingga ini nanti akan berdampak.

Untuk Pak Menteri Perdagangan. Ini apresiasi, Pak, maaf, Menteri BUMN, apresiasi, Pak Erick. Ini *consolidated financial report* BUMN bagus, Pak, saya sudah baca. Ini belum pernah ada sebelumnya. Juga *dividen* yang tertinggi sepanjang sejarah BUMN, serta beberapa perusahaan BUMN yang masuk pada Fortune 500, ya.

Saya akan menyampaikan apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Darmadi mengenai mempertahankan kinerja BUMN ke depan. Ini kata kuncinya ada di pimpinan di BUMN, Pak, sehingga penunjukan direksi terutama, ini harus berdasarkan pada kompetensi, ya. Kalau ditunjuk hanya atas pertimbangan politik semata, nantinya Menteri BUMN yang akan pusing, Pak.

Mengenai aspirasi dari dapil. Saya sudah WA Pak Erick, bahwa beras Bulog 10 kilo untuk rakyat miskin, ternyata di dapil saya, setelah ditimbang ulang hanya 8,45 kilo. Ini benar-benar memalukan, jatahnya rakyat kecil dirampok. Salahnya di mana, kita *enggak* tahu, apakah tera timbangannya yang salah, apakah oknum Bulog-nya yang salah, atau ya karungnya bocor atau apa pun. Tapi ini aneh ini, ternyata solusinya diganti, hanya begitu. Jadi, karungnya diganti dengan yang baru. Bukan, bukan, solusi, bukan seperti itu saja. Setidaknya ada tindakan yang diambil, orang sudah jelas untuk rakyat kecil, Pak, *dicolong* 15%, *kan kebangetannya* sudah lewat menurut saya. Rasanya ini harus menjadi perhatian yang sangat serius ya, untuk hal-hal yang menyangkut masyarakat kecil. Kita *ndak* tahu, apakah ada tindakan tegas kepada para pelakunya, ya. Tetapi yang kita dapat kabar, tahu-tahu ada pergantian di direksi, sehingga rasanya *enggak* ada urusannya dengan ini, tetapi ini harus menjadi perhatian Pak Menteri ke depannya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, kawan-kawan.



Dari meja Pimpinan?

Ya, silakan, Pak Martin.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Bimo.

**Pak Menteri Perdagangan,
Menteri BUMN, dan
Menteri Koperasi,**

Saya pikir ini rapat terakhir ya, sebelum periode berakhir. Jadi, kita *ngomong* panjang-panjang juga, nanti kan pasti pejabat berikutnya juga yang harus melaksanakan.

Jadi, saya cuma mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama ini, dan juga kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Republik, dengan tupoksi masing-masing. Dan tentu kita berharap, baik Bapak-bapak Menteri ke depan akan bisa terus berbakti bagi bangsa dan negara kita. Demikian juga kami di DPR, maupun yang masuk lagi di DPR, maupun yang akan berkarier di tempat lain. Jadi, saya pikir *best of hopes* untuk Indonesia ke depan.

Terima kasih, Pak Bimo.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Dari saya, saya biasa kalau *telpon* menyebut Kang Teten, terima kasih. Kemudian, Bang Zul, terima kasih juga atas kerja samanya, dan Mas Menteri, Pak Erick. Saya kira kalau dari Kementerian BUMN, tugas berat yang selama ini selain COVID, kepada Kementerian BUMN, tentu terkait dengan visi besar Pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Memang ini menjadi sukses besar dari pemerintahan saat ini. Tetapi, sebenarnya buat bangsa kita bukan suatu yang sukses, kita hanya mengejar keterlambatan saja yang sebelumnya belum ada. Dan kita harapkan infrastruktur ini mampu *me-leverage* aset bangsa ini, baik di kelautan, pertanian, perkebunan, sumber daya mineral, serta pariwisata, itu menjadi lebih produktif, ya.

Juga bagaimana BUMN juga *mempelopori* tentang *hilirisasi* dan industrialisasi. Kita *bikin* Panja-Panja, bagaimana restrukturisasi di BUMN dengan *holdingisasi* sektor perkebunan, kelautan, dan sumber mineral. Ini adalah hal-hal yang menyangkut visi besar pemerintahan 10 tahun Jokowi.



Dan tentunya, ke depan, tetap akan dilanjutkan dengan tambahan visi energi hijau dan pemberdayaan ekonomi maritim, kalau tidak salah, saya baca-baca. Tentunya kami percaya, bahwa BUMN menjadi ujung tombak ekonomi nasional, dan tentunya terus akan berperan aktif di dalam menjalankan visi pemerintahan ke depan.

Kami melihat, bahwa proyek-proyek strategis nasional itu akan mampu menciptakan kita sebagai bangsa yang lebih mandiri. Kita juga tahu bagaimana proyek-proyek strategis nasional yang ditugaskan kepada, kepada BUMN, khususnya BUMN Karya, itu juga akan menjadikan baru terlihat, kadang, ternyata PMN-PMN kita cukup kompetitif, juga tidak hanya secara nasional, tapi juga di *scope* global.

Namun, selalu Komisi VI, selalu menegaskan dengan bijak, bagaimana penugasan-penugasan itu tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi kita, Pak Menteri juga punya Wamen yang cukup kuat, jangan sampai mengorbankan keseimbangan soal finansialnya sisi keuangan BUMN. Ini yang menjadi kekhawatiran kita dan tentunya ke depan bisa kita perbaiki.

Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan dengan sektor swasta itu juga harus kita jaga dan harus kita tingkatkan dari berbagai rapat-rapat kerja di Komisi VI ini. Kita berharap, bahwa kementerian ke depan tetap mengedepankan di dalam RDPU maupun dalam rapat kerja maupun di Panja, yaitu soal efisiensi, soal transparansi, dan soal profesionalitas. Itu tetap menjadi hal yang penting untuk menguatkan hal-hal yang terkait dengan kinerja BUMN, terutama di sisi keuangan. Bahkan itu pun juga sudah kita rumuskan sebenarnya, yang menjadi PR kita dan belum selesai adalah di Undang-Undang BUMN.

Inshaallah, nanti ke depan tetap menjadi hal yang penting, karena di situlah sebenarnya substansi Undang-Undang BUMN adalah memperbaiki kinerja dalam sisi keuangan, penguatan tata kelola. Dan kita berharap, dengan undang-undang itu, BUMN bisa memberi, bisa lebih memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kami tetap akan memberikan dukungan penuh dari Komisi VI ini. Sayap APBN dan sayap BUMN menjadi motor penggerak utama di dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kemudian, untuk Kang Zul. Kita percaya, bahwa terus yang kita tekankan adalah lebih bagaimana memperkuat perdagangan domestik juga perdagangan internasional. Tentu terkait dengan hulunya, yaitu dalam meningkatkan daya saing lokal, kita juga terus tekankan bagaimana penguatan akses pasar, terutama untuk ekspor serta masuknya era digitalisasi sebagai rantai pasok.

Kami berharap ke depan, perdagangan harus terus ditingkatkan antara sinergi pemerintah dan sektor swasta. Kami juga ingin Kemendag selalu

berupaya menjaga stabilitas harga, terutama soal pangan, yang terus kita *uplek-uplek* di Komisi VI. Dan bagaimana ekspor komoditas yang harus kita navigasikan. Faktanya itu masih menjadi unggulan. Serta di internal Kang Zul untuk efisiensi di birokrasi, karena menteri-nya berganti-ganti selama tiga kali, Kang Zul, lima tahun terakhir ini.

Dan Kementerian Perdagangan, ke depan kami tetap percaya walaupun *value*-nya, sistemnya, sangat kapitalistis dan sangat liberal, tapi kami percaya Kementerian Koperasi dan UKM tetap bisa bernavigasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, karena tanpa koperasi, kalau sektor privat dan hanya BUMN, pemerataannya yang paling berat. Pertumbuhannya mungkin bisa dicapai, terutama dalam memasuki di era digitalisasi.

Kami percaya, daya saing produk lokal sekarang ini dengan suksesnya infrastruktur, akses pasar UMKM, tidak hanya lokal, tapi juga regional, nasional, bahkan global. Maka produk-produk lokal, kalau itu bisa dikolaborasikan dengan berbagai sektor, terutama BUMN ataupun swasta lainnya, kita akan mampu masuk ke era global. Maka, program *literalisasi* di sektor digitalisasi dengan modernisasi bisnis UMKM, kami percaya akan menjadi prioritas ke depan.

Hal yang penting kawan-kawan sekalian, bahwa proyeksi ke depan memang penerimaan negara ini dari pidato Bu Menteri adalah 2.999 triliun. Itu ekspektasi untuk penerimaan negara tahun 2025, sementara APBN kita disampaikan 3.600 triliun, maka ada defisit 600 triliun. Tentu kita akan menambah utang yang sudah 9.000 triliun saat ini. Maka kebijakan APBN di tahun 2025, kami percaya, harus mengutamakan kehati-hatian, ya. Bagaimana prioritas alokasi anggaran yang sangat perlu, diperlukan, adalah efisiensi, dan penggunaan anggaran negara menjadi keharusan demi pembangunan nasional dan perbaikan nasional dengan prinsip kehati-hatian.

Terima kasih semuanya.

*Sungguh indah melihat tumbuh-tumbuhan
Apalagi tumbuhan seruni
Mohon maaf untuk setiap kesalahan
Terima kasih untuk kerja samanya selama ini*

Kebanyakan saran, Mas Menteri, Kang Menteri, dan Bang Menteri. Maka cukup, *closing statement aja* dan segera kita ambil kesimpulan rapat, dimulai dari Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri Koperasi.

Kami persilakan.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Baik.

**Pak Ketua,
Seluruh teman-teman Anggota Dewan yang terhormat,**



Sungguh, hari ini hari yang mengharukan dan membahagiakan. Pak Teten 5 tahun, Pak Erick 5 tahun, mungkin lebih, saya 2 tahun. Banyak yang kita bicarakan di sini, kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, ya. Tapi kami semua paham, bahwa *based on national interest, based on* merah putih, Pak. Semua yang kita kerjakan untuk Indonesia, untuk merah putih, agar Indonesia lebih baik.

Bapak-Bapak sudah habis-habisan, kami juga begitu. Tentu ada yang baik, ada juga yang belum, kami minta maaf, kalau harapan Bapak-bapak, harapan, tentu harapan rakyat yang dititipkan kepada Bapak-bapak, belum semua bisa kita penuhi, *gitu*.

Ya, tentu kalau salah, ya, kami tanggung jawab. Pak Teten, Saya, Pak Erick, kekurangan dari sini tentu dari kelemahan kami. Tentu kami minta maaf, apa yang kami lakukan. Mungkin sekali lagi tidak memenuhi harapan Bapak-bapak.

Yang kedua, kami bolehlah sekali-sekali, Pak Erick, ya, kita tidak jawab, tapi nanti jawabannya tertulis, Bu Evita, ya. Iya, sekali-sekali pantun boleh, *kan?* Katanya terakhir ini, terakhir ini. T

api terus terang, Pak Ketua dan teman-teman, kadang-kadang rapat yang keras di sini itu yang buat kita semangat, *gitu*, betul. *Kok* ini keras, ya? Tapi ya itu yang membuat kita tertantang, *gitu*. Mungkin kalau santai-santai *aja* juga, kita juga santai, barangkali.

Jadi, kalau ada prestasi, ada kemajuan yang kami capai, karena sebetulnya desakan dan, apa namanya, kritikan, dan masukan dari teman-teman. Itulah kalau kita sampai bagus, sukses. Tapi kalau kurang, ya, sekali lagi, kami yang kurang.

Itu, dan ya, waktu semua yang terikat pada waktu, ya, akan berlalu itu. Yang abadi, itu ya, kehidupan setelah kehidupan, *gitu*.

Kami semua kurang mungkin penyampaian, perilaku atau harapan teman-teman ada yang kurang, sekali lagi kami minta maaf, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih.

Boleh pantun, Pak Erick, ya? Pantun apa saya, ya?

*Kalaulah tidak karena tinta
Takkan dapat kugugah sebuah lagu
Kalaulah tidak karena cinta Indonesia
Tak mungkinlah kita berada di sini*

Iya.



Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera,
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mas Menteri BUMN, cukup? Diwakili?

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dan Menteri BUMN Republik Indonesia tentang Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI Rabu, 11 September 2024.

1. Komisi VI DPR RI menyetujui Alokasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian BUMN Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024, tanggal 10 September 2024, perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
 - a. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sebesar Rp937.170.000.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*)
 - b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp1.853.280.000.000,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)
 - c. Kementerian BUMN Republik Indonesia sebesar Rp277.500.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), Rp277.500.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), untuk Kementerian BUMN

Sesuai surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk segera menyampaikan penyesuaian rincian anggaran per program paling lambat 12 September 2024, untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

Demikian kesimpulan rapat pada hari ini.

2. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.



Terima kasih saya ucapkan kepada Pimpinan, kawan-kawan Anggota Komisi VI, atas kesediaan waktu mengikuti rapat sampai siang hari ini. Begitu juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian BUMN, serta jajarannya yang telah mengikuti rapat.

Rapat Kerja kali ini kita mulai dari pagi, tujuannya agar semua rakyat bisa terlayani. Ke depan semuanya, ke depan semua kita bisa terus bersinergi untuk kemajuan negeri ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.27 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001